

**KAJIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOLABORATIF
TAMAN NASIONAL KUTAI**
*(Study on the Effectiveness of Collaborative Management of Kutai
National Park)*

Faiqotul Falah¹

¹Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam, Jl.Sukarno-Hatta
Km 38, Samboja, PO Box 578 Balikpapan 76112,
telp/fax (0542) 7217663/7217665, Email : fiker3@yahoo.com

Diterima 13 Februari 2012, disetujui 2 Agustus 2012

ABSTRACT

Kutai National Park (TNK) area has been defragmented and degraded due to illegal logging, forest fire, and land occupation. Collaborative management of TNK has been exists with the establishment of Mitra Kutai. However various problems occur in TNK as indication that the collaborative management has not yet effective. This paper aims to describe information regarding the institutional effectiveness of collaborative management in TNK. This research was conducted by : 1) identification of related policies; 2) policy content analysis; 3) identification of stakeholders' perception and roles, 4) qualitative analysis on stakeholders' perception and roles, 5) SWOT analysis, and 6) formulation of recommendation on improvement steps of collaborative management of TNK. It was concluded that collaborative management of TNK was ineffective in solving various problems occurred, and therefore it is necessary to make improvement by the following steps : 1) Study the potential and current conditions of TNK; 2) Publish research results and raise issues on the problems and important values of TNK; 3) Strengthen networking with funding organizations; 4) Establish zonation area; 5) Reconfigure collaboration management organization and arrange programmes and scheme on budget agreed by all stakeholders; 6) Make collaboration on the development of model of conservation village; and 7) Collaboration in the economic utilization programmes in TNK, such as development of agro-tourism area, the environmental education center, safari-park and eco-tourism areas and research area

Keywords: *Collaboration, institution, ecosystem based forest management, stakeholders' roles*

ABSTRAK

Kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) mengalami defragmentasi dan degradasi habitat akibat perambahan, penebangan liar, serta kebakaran hutan. Kemitraan pengelolaan TNK terbentuk sejak 1994 dengan adanya Mitra Kutai. Namun berbagai permasalahan yang muncul mengindikasikan bahwa pengelolaan kawasan TNK belum efektif. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai efektivitas kelembagaan pengelolaan kolaboratif di TNK. Penelitian dilakukan dengan cara : 1) identifikasi kebijakankesepakatan yang berlaku, 2) analisis isi kebijakan, 3) identifikasi persepsi dan peran pemangku kepentingan; 4) analisis kualitatif terhadap persepsi dan peran pemangku kepentingan 5) analisis SWOT, dilanjutkan 6) rekomendasi penyempurnaan kelembagaan kolaborasi Mitra Kutai. Disimpulkan bahwa pengelolaan kolaborasi di TNK ternyata belum efektif, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah berikut : 1) Penelitian potensi dan kondisi terkini TNK; 2) publikasi hasil penelitian serta

mengangkat isu permasalahan dan nilai penting TNK melalui media; 3) Penguatan jejaring kerja dengan lembaga donor internasional; 4) Penetapan/zonasi kawasan; 5) Rekonfigurasi lembaga kolaborasi pengelolaan TNK serta penyusunan program dan skema pendanaan yang disepakati semua pihak; 6) Kolaborasi dalam Pembangunan model Desa Konservasi; dan 7) Kolaborasi dalam program pemanfaatan ekonomi kawasan, seperti pembangunan kawasan agrowisata, pusat pendidikan lingkungan, taman safari dan kawasan ekowisata serta areal riset/penelitian.

Kata kunci: Kolaborasi, kelembagaan, pengelolaan kawasan berbasis ekosistem, peran pemangku kepentingan

I. PENDAHULUAN

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (UU No 41/1999). Konsep yang diterapkan dalam pengelolaan taman nasional adalah pengelolaan kawasan berbasis ekosistem. Pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem memerlukan adanya kerjasama atau kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan tercapainya kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan keseimbangan fungsi-fungsi ekologis, ekonomis dan sosial dari suatu ekosistem hutan (von Gadow *et al.*, 2000 dalam Suhendang, 2004). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 19 tahun 2004, pengelolaan kolaboratif didefinisikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepakatan dan kesepakatan bersama.

Sebagian besar kawasan konservasi di Indonesia berada dalam tekanan karena adanya tiga ancaman utama yaitu: klaim dan okupasi oleh masyarakat lokal, perambahan oleh industri, dan konflik antara pemerintah pusat

dan daerah atas kewenangan sumber daya alam (Moeliono dan Purwanto, 2008). Kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) tak luput dari ketiga ancaman tersebut. Perubahan tata guna lahan di sekitar TNK yang meningkatkan akses dan tekanan pihak luar terhadap kawasan, euforia otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah dan masyarakat merasa memiliki hak penuh untuk mengeksploitasi sumber daya alam, kandungan minyak bumi dan batu bara di TNK yang menjadi sumber konflik antara sektor kehutanan dan pertambangan, serta lemahnya penegakan hukum, merupakan permasalahan kompleks yang menyebabkan kawasan TNK mengalami degradasi kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati (Wiratno *et al.*, 2001; Balai TN Kutai, 2010). Munculnya permasalahan kompleks dan berlarut-larut yang melibatkan banyak pemangku kepentingan ini mengindikasikan pentingnya tercapai kesepakatan dan kesepakatan bersama, serta implementasi pengelolaan kolaboratif yang efektif di TNK.

Beberapa syarat agar pengelolaan berbasis ekosistem secara kolaboratif dapat efektif untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat kawasan konservasi, antara lain :

1. Prinsip holistik, yaitu pengelolaan kawasan harus memperhatikan seluruh fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial dalam ekosistem;
2. Prinsip integratif, yaitu : a). pengelolaan berdasar kerjasama antar seluruh pihak

(Suhendang, 2004); b).ditampungnya berbagai aspirasi para pemangku kepentingan (Awang, 2006); c). berdasar kesepahaman dan kesepakatan bersama (IUCN, 1996; Permenhut No 19 Tahun 2004); d). ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan (Awang, 2006); e). partisipasi yang tinggi dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal (Awang, 2006); dan f). ada fasilitator dan dewan penasehat yang berfungsi dengan baik dalam kelembagaan kolaborasi (Anshari, 2006; Erdman *et al.*, 2004, Moeliono dan Purwanto, 2008).

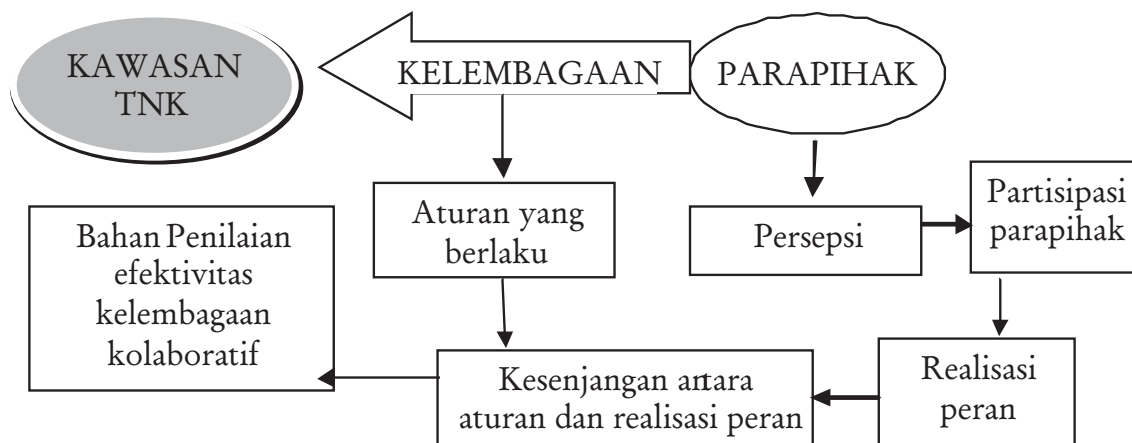
Tulisan ini bertujuan memaparkan informasi mengenai efektivitas kelembagaan

kolaboratif pengelolaan TNK, berdasar beberapa kata kunci yaitu realisasi fungsi kawasan, ada tidaknya kesepahaman dan kesepakatan bersama, aturan main yang berlaku, struktur kolaborasi, realisasi peran, partisipasi, relasi antar pemangku kepentingan, serta persepsi dan aspirasi para pemangku kepentingan.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pikir Penelitian

Bagan alir permasalahan penelitian disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Bagan alir permasalahan penelitian
Figure 1. Flowchart of research problem

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni sampai dengan November 2010, di kawasan Taman Nasional Kutai yang termasuk dalam wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

C. Pengambilan dan Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode survei, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi : a. peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan kolaboratif serta pemanfaatan sumberdaya hutan yang diizinkan di kawasan taman nasional; b.

- kesepakatan yang berlaku dalam pengelolaan kolaboratif kawasan TNK; c. kondisi fisik, ekologis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan TNK. Identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah data sekunder.
2. Analisis isi kebijakan pengelolaan kolaboratif kawasan TNK.
 3. Identifikasi persepsi, partisipasi dan realisasi peran parapihak dalam pengelolaan kolaboratif kawasan TNK.
 4. Analisis persepsi, partisipasi dan realisasi peran parapihak dalam pengelolaan kolaboratif kawasan TNK, secara kualitatif.
 5. Interpretasi data, analisis SWOT dan perumusan rekomendasi.
- Pengumpulan data primer mengenai persepsi dan realisasi peran para pemangku kepentingan dilakukan dengan metode wawancara terstruktur. Data sekunder diperoleh dari *website* Kementerian Kehutanan, Pusat Informasi Pengelolaan Kolaboratif, laporan kegiatan Balai TNK dan Mitra TNK, arsip Pemerintah Daerah, serta instansi lain yang terkait.

Tabel 1. Distribusi asal dan jumlah responden penelitian
Table 1. Distribution of source and amount of respondents

No	Asal responden (<i>Sources of respondents</i>)	Jumlah responden (<i>Amount of respondents</i>)
1	Balai TN Kutai	7 (Kepala Balai, Seksi Perencanaan, Seksi Sangatta dan Tenggarong, Resort Prewab, Sangkima, dan Menamang)
2	Anggota Mitra Kutai	5 perusahaan (Pertamina, KPC, PAMA, Indominco, Surya Hutani Jaya)
3	Pemerintah Kota Bontang	1 (Badan Lingk. Hidup)
4	Pemerintah Kab. Kutai Timur	3 (Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup)
5	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2 (Dinas Kehutanan, Badan Lingk. Hidup)
6	LSM lokal	1 (Yayasan BIKAL)
7	Masyarakat :	
	a. Dalam Kawasan (7 desa)	49
	b. Luar kawasan :	
	- Desa Swarga Bara (Seksi Sangatta)	7
	- Desa Menamang Kiri dan Menamang Kanan (Seksi Tenggarong)	14

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kawasan TN Kutai

TN Kutai memiliki luas 198.604 ha, terbagi dalam tiga wilayah administrasi, yaitu Kota Bontang (0,36% dari luas TNK), Kab. Kutai Kartanegara (12,88%), dan Kab. Kutai Timur (86,75%). Kawasan yang berhutan didominasi oleh tipe ulin (*Eusideroxylon zwageri*), meranti (*Shorea* sp.), kapur (*Dryobalanops aromatic*), dan Dipterocarpaceae campuran. Juga terdapat hutan bakau, hutan pantai, hutan kerangas, dan hutan rawa air tawar. Potensi flora mencapai 958 jenis. Potensi fauna mencakup 11 spesies primata (5 endemik Kalimantan), antara lain orangutan (*Pongo pymaeus morio*), bekantan (*Nasalis larvatus*), dan Owa-owa (*Hylobates muelleri*). Satwa lain adalah banteng (*Bos javanicus*), rusa sambar (*Cervus unicolor*),

kijang muntjak (*Muntiacus muntjak*), kancil (*Tragulus* sp), beruang madu (*Helarctos malayanus*), macan dahan (*Neofelis didardi*), buaya muara (*Crocodylus porosus*), buaya senyulong (*Thomistoma schelegeli*) dan 330 spesies burung. Kawasan TNK merupakan daerah tangkapan air bagi Sangatta (ibukota Kutai Timur) serta zona aquifer yang menyuplai kebutuhan air bersih Kota Bontang yang berada di kawasan TNK. TNK memiliki tak kurang dari lima Daerah Tujuan Wisata Alam, namun belum semuanya dapat dikembangkan karena besarnya tekanan terhadap kawasan (Balai TN Kutai, 2010). Dalam sejarahnya, kawasan konservasi ini berkali-kali mengalami pelepasan sebagian wilayah untuk berbagai tujuan, seperti terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sejarah kawasan TNK

Table 2. History of Kutai National Park area

Tahun (Years)	Kegiatan (Activities)
1936	Disetujui Suaka Margasatwa Kutai seluas 306.000 hektar (Sultan Kutai, SK (ZB) No 80/22-B/1936)
1957	Ditetapkan Suaka Margasatwa Kutai (SK Menteri Pertanian No 110/UN/1957)
1969	100.000 hektar dikeluarkan untuk eksplorasi minyak (Pertamina) dan hak pengusahaan kayu (HPH)
1973	106.000 ha di pesisir timur diberikan ke HPH PT Kayu Mas, PT Badak NGL dan PT Pupuk Kaltim (PKT)
1991	- 1,371 hektar dilepaskan untuk perluasan kota Bontang dan ekspansi PT PKT (SK Menhut No 435/Kpts-XX/1991) - Pembangunan Jalan Poros Bontang – Sangatta sepanjang 68 km dan membuka lahan TNK seluas ± 48 hektar
1995	SM Kutai menjadi TN Kutai seluas 198.629 ha (SK Menhut No 325/Kpts -II/1995)
1997	Persetujuan prinsip perubahan sebagian kawasan TNK seluas + 25 ha menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, yang kemudian dilepaskan untuk perluasan Kota Bontang (Surat Menhut No 997/Menhut -VII/1997)
1998	- Mengesahkan empat desa di dalam kawasan TN sebagai desa definitif (Gubernur Kaltim) dalam Kec. Sangatta Selatan - Pembuatan zona pemanfaatan khusus di Sangatta Selatan
1999	- Pemekaran Kab. Kutai menjadi Kab. Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang - Usulan enclave seluas 23.712 ha (Pemerintah Kab. Kutai Timur)
2005	Kec. Sangatta Selatan dimekarkan menjadi Kec. Sangatta Selatan dan Teluk Pandan, 4 desa yang ada dimekarkan menjadi tujuh desa
2007	Menhut membentuk Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan TN Kutai, memberikan tiga opsi, yaitu 1) pelepasan kawasan, 2) relokasi masyarakat dari dalam kawasan, dan 3) membentuk Zona Khusus di TN Kutai

Sumber : Balai TN Kutai, 2010

Source : Institute of Kutai National Park, 2010

Sejarah pelepasan kawasan untuk berbagai kepentingan di atas menjadi salah satu alasan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk menuntut *enclave*. Saat ini pada bagian kawasan TN Kutai yang diusulkan untuk *dienclave* telah berdiri bangunan pemukiman, sarana prasarana pemerintahan, sarana prasarana umum seperti sekolah (TK sampai dengan SLTA), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), jalan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pasar, stasiun pompa bensin, 13 menara pemancar sinyal seluler, tempat pelelangan ikan dan jaringan listrik. Dijumpai pula tempat penggergajian kayu, hotel-hotel, rumah-rumah makan dan tempat hiburan (karaoke dan panti pijat). Tahun 2009 jumlah penduduk di dalam kawasan TN Kutai tercatat 27.495 jiwa, terdiri dari mayoritas suku Bugis, sisanya Jawa, Dayak, Banjar, dan Kutai. Hasil survei menyatakan bahwa di kawasan TN Kutai dijumpai potensi batubara sebesar 2,1 milyar metrik ton yang menjadi incaran investor untuk dieksploitasi dan juga menjadi alasan bagi para spekulan melakukan jual beli lahan dalam kawasan TN Kutai. Masalah pembebasan lahan dalam kawasan TN Kutai juga menjadi bahan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kutai Timur tahun 2010 (wawancara dengan masyarakat, 2010).

A. Peraturan yang Terkait dengan Pengelolaan Kolaboratif TNK

Beberapa aturan main yang terkait dengan pengelolaan kolaboratif di TNK dan implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai dasar hukum yang memungkinkan TNK dikelola bersama dan menampung berbagai kepentingan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan rekreasi.
2. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang implikasinya antara lain bahwa untuk menjaga fungsi taman nasional, perlu prasyarat pemantapan kawasan yang belum terpenuhi karena tingginya tekanan dan bahwa kegiatan penambangan minyak dan batubara serta pemukiman masyarakat dalam kawasan TNK adalah melanggar hukum (*illegal*).
3. UU No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyatakan sub bidang kehutanan merupakan urusan pilihan yang dapat dikelola daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat turut serta berkolaborasi dalam pengelolaan TNK.
4. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain mencantumkan kewajiban perusahaan menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) sebesar maksimal 2% dari laba perusahaan untuk lingkungan dan maksimal 2% untuk sosial. Ini merupakan dasar hukum bagi perusahaan yang beraktifitas di sekitar TNK untuk ikut menyumbangkan dana dan berkolaborasi dalam pengelolaan TNK.
5. Permenhut No P.19 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, antara lain berisi pedoman persiapan, implementasi, pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Implikasinya perlu dibangun lembaga kolaborasi multipihak pengelolaan TNK dengan aturan main yang jelas mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
6. Permenhut No P.56 Tahun 2006 tentang Zonasi Taman Nasional, yang menyatakan Pemanfaatan kawasan TN dapat dilakukan di zona religi, zona budaya, zona penelitian dan zona khusus, sehingga memungkinkan kolaborasi lebih lanjut dengan masyarakat dan berbagai pihak di zona khusus, serta

dengan lembaga penelitian di zona penelitian.

7. Permenhut No P. 64 Tahun 2006, tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang implikasinya adalah keberadaan Pertamina, masyarakat, serta berbagai sarana fisik seperti SPBU di TNK adalah melanggar hukum.

C. Aturan Main dalam Kemitraan Pengelolaan TNK serta Implementasinya

Salah satu fungsi utama Mitra Kutai adalah penggalangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari anggotanya untuk membiayai program-program pengelolaan TNK. Selama 14 tahun (1995-2008) telah tersalurkan dana sebesar Rp. 7,78 milyar dari Mitra Kutai, yang berarti rata-rata penyaluran dana adalah sekitar Rp 500-600 juta per tahun. Prioritas penggunaan dana adalah sebagai berikut : (1) Kampanye pelestarian 20%, (2) Pengembangan ekowisata 4%, (3) Sarana & Prasarana 20%, (4) Pengembangan SDM 3%, (5) Penelitian 2%, (6) Rehabilitasi kawasan 26%, (7) Pengamanan 5%, (8) *Community Development* 8%, dan (9) Sekretariat 12%. Saat ini muncul kejenuhan pada anggota-anggota Mitra Kutai karena program-program kegiatan yang dilaksanakan selama ini bersifat insidental/tidak berkesinambungan dan tidak diarahkan untuk mengatasi permasalahan mendasar di TNK.

Hasil wawancara kepada masyarakat menyatakan bahwa mereka ternyata tidak mengenal apa yang disebut Mitra Kutai, sehingga bisa dikatakan bahwa kepentingan perusahaan untuk mengangkat citranya dalam aktivitas pelestarian lingkungan tidak tercapai. Pembentukan Mitra Kutai mempunyai beberapa tujuan, yaitu : 1) Penyadaran masyarakat; 2) Mendapat dukungan masyarakat luas; 3) Mengurangi tekanan terhadap hutan; 4) Pengelolaan kawasan yang lebih baik; dan 5). Kepastian hukum bagi masyarakat dan kawasan (Pusat Informasi Pengelolaan Kolaboratif, 2006).

Ditinjau dari keberhasilan pencapaian tujuan pembentukan Mitra Kutai, fakta yang ada di lapangan terkait pembukaan lahan yang terus menerus terjadi, masih adanya tindak penebangan liar di kawasan TNK, serta belum adanya kepastian hukum bagi perambah legal di tujuh desa sepanjang Jalan Poros Sangatta-Bontang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Mitra Kutai selama ini belum efektif.

Dari hasil wawancara terhadap anggota Mitra Kutai, tergalih harapan anggota untuk penyempurnaan kelembagaan Mitra Kutai, yaitu sebagai berikut :

- (1). Penambahan unsur keanggotaan, tidak hanya dari perusahaan, namun juga dari LSM, Pemerintah Daerah, serta wakil masyarakat;
- (2). Kejelasan aturan main sejak dari tahap perencanaan s.d. evaluasi;
- (3). Program kegiatan yang lebih terarah, tepat sasaran dan berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan di TNK;
- (4). Sekretariat/badan pelaksana yang independen dan profesional;
- (5). Adanya pelaporan keuangan secara berkala dan transparan;
- (6). Audit keuangan yang dilakukan auditor independen; dan
- (7). Pemilahan secara tegas pengelolaan keuangan Mitra Kutai dengan pengelolaan keuangan Balai TN Kutai yang bersumber dari dana APBN.

Muncul wacana untuk merekonfigurasi kelembagaan Mitra Kutai menjadi semacam konsorsium dengan merekrut personil Badan Pengelola/Pelaksana Mitra Kutai yang berasal dari kalangan profesional, memperbesar peran anggota Mitra Kutai, serta melibatkan Pemerintah Daerah, LSM dan wakil-wakil masyarakat dalam keanggotaan Mitra Kutai yang mempunyai hak untuk terlibat langsung dalam perencanaan program Mitra Kutai. Untuk itu diperlukan dasar hukum/nota kesepahaman baru yang mengikat Kementerian Kehutanan serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam Mitra Kutai. Rekonfigurasi direncanakan berlangsung bertahap dalam jangka waktu

lima tahun. Kelembagaan kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekosistem memerlukan adanya pendanaan yang berkelanjutan. Sumber dana pengelolaan dapat diperoleh dari dana CSR perusahaan (diusulkan *trust fund*), jasa lingkungan, APBD (kerja sama dengan Pemkab) dan dana tak mengikat dari publik.

Belum ada tanggapan resmi dari perusahaan anggota Mitra Kutai mengenai rencana dana perwalian tersebut, namun hasil wawancara menyatakan ada kemungkinan perusahaan dapat menerima bentuk *trust fund*, dengan persyaratan : (1) kinerja lembaga pengelola harus bisa meyakinkan penyandang dana; dan (2) skema pendanaan jelas, sesuai tujuan pembentukan lembaga kolaborasi, serta dapat mengangkat citra perusahaan dalam aktivitas pelestarian lingkungan.

D. Realisasi Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan TNK

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (1)

pemangku kepentingan utama yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, atau proyek; (2) pemangku kepentingan pendukung (sekunder), yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung, tetapi memiliki kepedulian sehingga turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan pemerintah; dan (3) pemangku kepentingan kunci, yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan sering diidentifikasi dari segi kekuatan dan kepentingan relatif terhadap isu, atau dari segi pengaruh yang mereka miliki (Ramirez, 1999). Kepentingan (*importance*) merujuk pada peran dalam pencapaian luaran dan tujuan, serta menjadi fokus pertimbangan terhadap keputusan. Pengaruh (*influence*) merujuk pada kekuatan yang dimiliki untuk mengontrol proses kebijakan (Kanji *et al.*, 2001; Mardle *et al.*, 2003; Suaedi, 2011). Hasil analisis peran para pemangku kepentingan disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis peran para pemangku kepentingan
Table 3. The result of stakeholders' roles analysis

Pemangku kepentingan (stakeholder)	Kepentingan/ minat (Importance/ interest)	Fungsi/ peran (Function/ roles)	Realisasi fungsi (Realization of function)	Pengaruh terhadap kelestarian TNK (Influence on the sustainability of TNK)	Kontribusi (positif / negatif) (Contribution (+/-))	Optimalisasi peran (Optimalization of roles)
Pemegang kepentingan kunci						
Kementerian Kehutanan	Pelestarian ekosistem dan biodiversitas TNK	Perencanaan, operasional pengelolaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi	Kegiatan pengelolaan didominasi Balai TNK, kolaborasi pengelolaan TNK masih lemah, bermasalah dalam pengamanan dan penegakan hukum	Kebijakan pengelolaan sangat berpengaruh pada kelestarian TNK	Positif	Penyamaan persepsi, penggalangan kolaborasi, nota kesepahaman, Penetapan zonasi
Kementerian Energi, Sumberdaya, dan Mineral (ESDM)	Potensi minyak dan batubara dalam kawasan TNK	Pengelolaan Sumberdaya energi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat	Kuasa eksplorasi minyak dalam kawasan (Pertamina), eksplorasi batubara sekitar kawasan, belum memberi kuasa eksplorasi batubara dalam kawasan	Kebijakan untuk memberi atau menolak izin/kuasa pertambangan dalam kawasan akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian TNK	Negatif	Komitmen tidak memberi kuasa penambangan batubara dalam kawasan, penegakan hukum reklamasi lahan bekas tambang
Pemkab. Kutai Timur	Fungsi pengatur iklim, hidrologis, kesejahteraan masyarakat, potensi batubara dalam kawasan TNK	Pembangunan daerah Kutim untuk kesejahteraan masyarakat	Penekanan kecamatan dan desa, pemberian izin dan dana pembangunan fisik dalam kawasan, bantuan pertanian bagi masyarakat dalam kawasan	Dukungan terhadap keutuhan kawasan dan komitmen kolaborasi sangat berpengaruh pada kelestarian TNK	Negatif	Komitmen menjaga keutuhan kawasan, kolaborasi pengelolaan kawasan yang dihuni masyarakat
Pemkab Kota Bontang	Pelindung zona aquifer kota Bontang	Pembangunan daerah Bontang untuk kesejahteraan masyarakat	Partisipasi dalam kampanye pelestarian TNK, rehabilitasi mangrove dalam kawasan TNK	Dukungan terhadap keutuhan kawasan dan komitmen untuk berkolaborasi dalam pengelolaan TNK akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian TNK	Positif	Komitmen untuk menjaga keutuhan kawasan TNK, kolaborasi dalam pengelolaan kawasan

Pemkab Kutai Kartanegara	Fungsi hidroorologis dan pengatur iklim kawasan TNK	Pembangunan daerah Kukar untuk kesejahteraan masyarakat	Partisipasi dalam kampanye pelestarian TNK, rehabilitasi lahan dalam kawasan TNK di Menamang	Positif	Komitmen untuk menjaga keutuhan kawasan TNK, kolaborasi pengelolaan kawasan
Pemangku kepentingan primer					
Masyarakat lokal	Pemanfaatan sumberdaya alam di TNK untuk peningkatan kesejahteraan	Ikut menjaga kelestarian lingkungan dalam kawasan TNK	Pemukiman dan pembukaan lahan dalam kawasan TNK, Desa Sangkima Lama menetapkan Perdes perlindungan mangrove	Negatif bagi yang membuka lahan dalam kawasan	Penyamaan persepsi tentang status kawasan, komitmen untuk tidak memperluas perambahan, komitmen kolaborasi
Perusahaan anggota Mitra Kutai	Keamanan beraktivitas di sekitar kawasan TNK, izin eksplorasi kawasan, citra perusahaan	CSR lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar TNK	Penyandang dana Mitra Kutai, kurang terlibat dalam perencanaan, operasional, dan monitoring evaluasi	Positif	Komitmen kolaborasi multipihak, dalam pendanaan, perencanaan, dan monitoring evaluasi pengelolaan
Investor pertambangan	Potensi batubara yang sangat besar dalam kawasan TNK	Eksploitasi batubara	Disinyalir membiayai spekulan lahan dalam kawasan TNK	Negatif	Penghentian upaya pembukaan lahan dalam kawasan
LSM lokal dan internasional	Project site sesuai visi misi lembaga	Pemberdayaan masyarakat, kelestarian kawasan konservasi	Fasilitator/ Mediator, pemberdayaan masyarakat, Sosialisasi/kampanye pelestarian TNK pada masyarakat lokal, riset	Positif	Riset potensi dan kondisi biodiversitas terkini, fasilitator dengan masyarakat dan media serta funding atau lembaga internasional yang berpengaruh

Pemangku kepentingan sekunder						
Pemprop Kaltim	Kaltim Green, potensi minyak dan batubara dalam kawasan TNK sebagai sumber PAD	Pembangunan daerah Kaltim untuk kesejahteraan masyarakat	Penetapan desa-desa dalam kawasan, pemekaran desa dan kecamatan, usulan APL dalam RTRWP Kaltim	Tidak berpengaruh langsung, tetapi bisa menentukan keutuhan kawasan	Negatif	Komitmen menjaga keutuhan kawasan TNK
Lembaga penelitian dan perguruan tinggi	Penelitian dan publikasi	Pengembangan ilmu dan teknologi terkait pengelolaan TNK	Penelitian terkait biodiversitas, sosial ekonomi dan kelembagaan	Tidak langsung berpengaruh, tetapi hasil penelitian dan publikasinya bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi aktor kunci	Positif	Perlu eksplorasi dan publikasi kondisi terkini biodiversitas TNK
Pers / media	Publikasi dan informasi kepada masyarakat	Informasi kepada berbagai pihak mengenai potensi, nilai penting, serta permasalahan TNK	Informasi mengenai potensi dan nilai penting TNK belum sampai ke masyarakat luas (lokal, regional, nasional, dan internasional)		Positif	Blow up isu permasalahan TNK, kondisi terkini, potensi dan kepentingannya

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa kepentingan para aktor dapat dikelompokkan secara umum dalam dua kategori, yaitu kepentingan ekologi dan ekonomi. Kepentingan/minat inilah yang mendasari tipe kontribusinya terhadap kelestarian TNK, apakah positif atau cenderung negatif. Untuk mengoptimalkan peran para aktor tersebut, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai pentingnya pelestarian TNK untuk menumbuhkan komitmen menjaga keutuhan kawasannya.

Penyamaan persepsi ini terutama penting bagi para pemangku kepentingan yang tinggi pengaruhnya dalam pengelolaan TNK, yaitu Kementerian Kehutanan, Pemkab. Kutai Timur, investor tambang, Kementerian ESDM, Pemprop. Kaltim, Pemkab. Kutai Kartanegara, dan Pemkot. Bontang, sebagaimana dapat dilihat pada matriks pemangku kepentingan dalam Gambar 2. Matriks tersebut membagi para pemangku kepentingan dalam empat kelompok berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya.

YANG BERKEPERINGAN	Tinggi	Kelompok A <i>(High interest, low influence)</i>	Kelompok B <i>(High interest, high influence)</i>
	Rendah	Kelompok C <i>(Low interest, low influence)</i>	Kelompok D <i>(Low interest, high influence)</i>
		Rendah	Tinggi
		Pengaruh	

Gambar 2. Matrik pengelompokan pemangku kepentingan berdasar minat dan pengaruh
 Figure 2. Matrix of stakeholders grouping based on the interest and influence

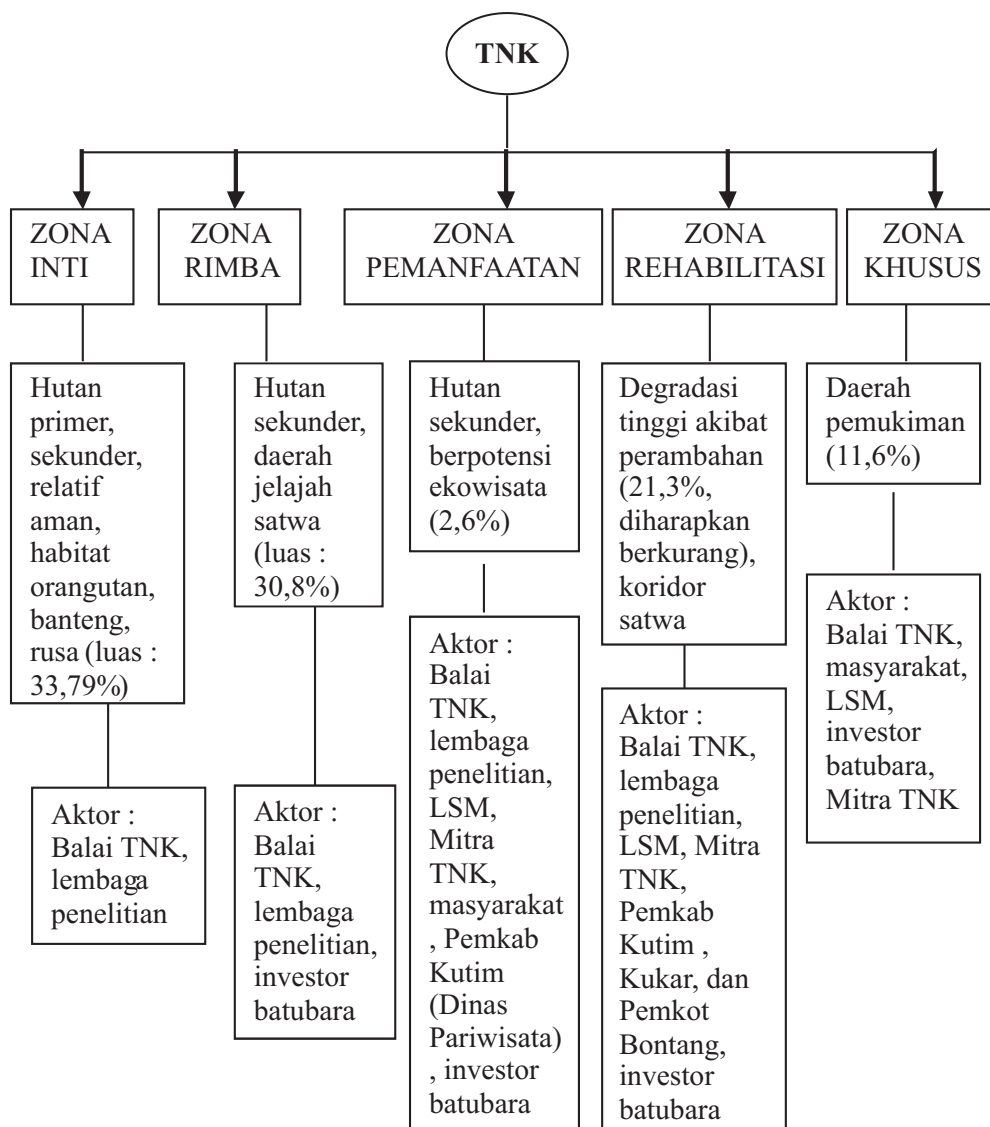
Kotak A menunjukkan kelompok pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap TNK tetapi rendah pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan, mencakup anggota lembaga/personal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tetapi bukan pengambil kebijakan. Kotak B menunjukkan kelompok pemangku kepentingan yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan seperti tokoh masyarakat, kepala instansi terkait dan kepala pemerintahan. Kotak C menunjukkan kelompok pemangku kepentingan yang

rendah pengaruh dan kepentingannya. *Interest* mereka diperlukan untuk memastikan : a) *interestnya* tidak terpengaruh sebaliknya, dan b) kepentingan dan pengaruhnya tidak mengubah keadaan. Kotak D merupakan pemangku kepentingan yang rendah kepentingannya tetapi berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.

Penyamaan persepsi dan penguatan komitmen para pemangku kepentingan terutama di Kotak B dan D diperlukan untuk mengelola seluruh kawasan TNK. Sampai tahun 2011, zonasi kawasan TNK belum dikukuhkan. Namun Balai TNK telah

merencanakan lima zonasi untuk mempermudah pengelolaan TNK, yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Zona Rehabilitasi, dan Zona Khusus. Bagan alir yang memaparkan kondisi dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan pada setiap zona yang direncanakan disajikan pada Gambar 3. Pada Gambar 3, tampak bahwa pemangku kepentingan yang paling dominan adalah Balai TNK (di semua zona), kemudian investor batubara (semua zona kecuali zona

inti), lembaga penelitian (berkegiatan di semua zona, meskipun pengaruhnya tidak signifikan), Pemerintah Kab. Kutai Timur, anggota Mitra Kutai, dan LSM (zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, dan zona khusus), masyarakat (zona pemanfaatan dan zona khusus), serta Pemkab Kutai Kartanegara dan Pemkot Bontang (zona rehabilitasi dan zona khusus). Strategi tindak lanjut pengelolaan TNK dapat disusun berdasar pemetaan pemangku kepentingan dan zonasinya.



Gambar 3. Kondisi dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan pada setiap zona yang direncanakan di TNK

Figure 3. Condition and actor's influences in each planned zonation of TNK

E. Persepsi Parapihak

Hasil pengambilan data dan analisis mengenai persepsi para pemangku kepen-

tingan terkait pengelolaan TNK disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Persepsi para pemangku kepentingan terkait pengelolaan TNK

Table 4. Stakeholders' perception about the management of TNK

Aspek (<i>Aspects</i>)	Keterangan (<i>Notes</i>)	Implikasi (<i>Implication</i>)
1. Fungsi kawasan TNK		
a. Fungsi pelestarian ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> - 71 orang (78,02%) memberi nilai 2 (kurang) - 20 orang (21,98%) memberi nilai 4 (baik) - Hasil citra landsat TNK tahun 2009 menunjukkan luas lahan berhutan 76,5% dari luas TNK - Hasil penelitian kolaborasi Unmul - OCSP : populasi orangutan diprediksi sekitar 2000 individu, yang berarti kondisi habitat bagus, terutama di zona inti 	Sebagian besar pihak terkait belum mengetahui informasi mengenai potensi dan kondisi terkini TNK perlu sosialisasi lebih lanjut untuk mendukung kampanye arti penting TNK
b. Fungsi pendidikan	Rata-rata nilai 4 (baik), namun dianggap pendidikan lebih terfokus pada pelajar, kurang menyentuh masyarakat, dan hanya insidental tidak berkesinambungan	Perlu pendidikan lingkungan lebih lanjut untuk masyarakat secara berkelanjutan
c. Fungsi penelitian	Rata-rata nilai 5 (sangat baik), meski belum terlihat kontribusi yang signifikan untuk pengelolaan, karena belum menyentuh permasalahan atau belum dipublikasikan, serta hasil riset masih tercerai berai	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu publikasi hasil penelitian TNK kepada media/pers, - Perlu pengumpulan hasil riset, penyusunan status riset dan inventarisasi potensi biofisik terkini
d. Jasa lingkungan	Rata-rata nilai 4, disadari pentingnya TNK sebagai daerah tangkapan air dan menjaga iklim setempat, terutama karena adanya ancaman kerusakan lingkungan akibat penambangan	- Perlu penelitian, publikasi, dan kampanye mengenai manfaat ekologi, arti penting dan nilai ekonomi jasa lingkungan TNK
e. Pemanfaatan ekonomi jasa lingkungan	Rata-rata nilai 1 (kurang sekali), karena belum ada pemanfaatan ekonomi air dan karbon, ekowisata tidak signifikan karena belum tergarap	Perlu penelitian manfaat ekonomi air, karbon, dan ekowisata TNK, dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana pengelolaan
2. Masalah dalam pengelolaan TNK	Tata ruang / zonasi kawasan (84,61%), pengamanan kawasan (9,9%) dan kelembagaan dan koordinasi antar pihak (5,45%)	Tata ruang menjadi prioritas penanganan masalah utama
3. Alternatif solusi	Penyamaan persepsi, penetapan dan pengukuhan zonasi, pengelolaan kolaboratif	

Hasil citra landsat TNK tahun 2009 menunjukkan bahwa lahan yang tertutup hutan primer seluas 8.860,73 hektar (4,46%), hutan sekunder seluas 137.802,46 ha (69,38%), dan hutan mangrove seluas 5.271,39 ha (2,66%), sehingga lahan yang masih berhutan adalah 76,5% dari total luas TNK. Hasil penelitian Dr. Yaya Rayadin dari Universitas Mulawarman memprediksi bahwa populasi orangutan liar di zona inti TNK sebanyak 1779 individu dan di zona rimba 298 individu (Balai TNK, 2010). Artinya masih ada sekitar 2000 orangutan di kawasan TNK, yang menjadi indikasi bahwa kondisi TNK terutama di zona inti masih sangat bagus dengan kelimpahan pakan orangutan cukup.

Wiratno, *et al.* (2001) menyatakan bahwa kemampuan pengelola taman nasional dalam mengkomunikasikan nilai-nilai tidak langsung juga sangat diperlukan, misalnya kerugian yang timbul jika terjadi penebangan pohon atau pembukaan lahan dalam kawasan, kerugian yang terjadi jika satwa kunci mati, serta kerugian masyarakat apabila terjadi pencemaran air di daerah hulu atau apabila kemampuan penyimpanan air hutan di daerah hulu menurun sehingga debit air menurun drastis. Teknik penilaian ekonomi sumberdaya secara komprehensif akan sangat membantu menjelaskan nilai-nilai tidak langsung yang dimiliki sebuah taman nasional. Oleh karena itu dalam penyampaian informasi nilai-nilai penting, kondisi terkini, serta permasalahan taman nasional akan memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, antara lain Balai TNK, lembaga penelitian, LSM lokal / nasional sebagai fasilitator, tokoh kunci di masyarakat, serta pers/media cetak dan elektronik untuk penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif. Apabila informasi tersebut tersampaikan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian ekosistem dalam kawasan TNK.

F. Relasi Antar Pemangku Kepentingan

Masalah yang dihadapi dalam relasi antar pemangku kepentingan antara lain adalah : (1) belum tercapainya penyamaan persepsi antara Balai TNK, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan masyarakat mengenai status kawasan konflik serta kegiatan yang boleh dilakukan di dalamnya; serta (2) kualitas komunikasi dan koordinasi antar semua pemangku kepentingan dalam menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan masing-masing di kawasan TNK. Semua responden sepakat bahwa isu pelestarian air menjadi kepentingan bersama bisa ditonjolkan dalam kampanye pelestarian dan proses penyamaan persepsi semua pemangku kepentingan pada tingkat lokal. Sedangkan isu pelestarian keanekaragaman hayati bisa ditonjolkan pada tingkat nasional dan internasional.

Kusumanto (2006) *dalam* menyatakan bahwa dalam proses adaptasi menuju pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi, proses komunikasi dan informasi harus menjangkau semua kelompok kepentingan, dan tidak hanya wakil-wakil atau pemimpin kelompok, namun juga semua anggota. Ini berarti bahwa harus dicari media komunikasi yang bisa menjangkau seluruh masyarakat.

Beberapa langkah yang disarankan oleh para pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara lain sebagai berikut :

1. Pindahan kantor Balai TNK ke wilayah Kab. Kutai Timur untuk memudahkan koordinasi dengan Pemkab. Kutai Timur dalam pengelolaan zona pemanfaatan dan zona khusus, mengingat 80% kawasan TNK termasuk wilayah administratif Kab. Kutai Timur.
2. Mengaktifkan forum komunikasi elektronik, seperti membangun jaringan surat elektronik antar pemangku kepentingan.
3. Bekerja sama dengan media cetak dan elektronik, terutama surat kabar, televisi,

dan radio lokal yang menjangkau masyarakat di dalam kawasan, terutama berkaitan dengan kampanye pelestarian TNK dan rencana pengelolaan TNK.

4. Mencari fasilitator baru yang bisa diterima oleh Pemerintah Kab. Kutai Timur, maupun masyarakat dalam kawasan, misalnya pihak Institut Pertanian Sangatta.
5. Perlu diketahui juga insentif dan disinsentif bagi kolaborasi yang bisa didapatkan para pemangku kepentingan.

G. Analisis SWOT dan Usulan Langkah-Langkah Penyempurnaan Pengelolaan Kolaboratif TNK

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui potensi dan peluang yang dimiliki oleh Balai TNK dan para mitranya untuk mengatasi hambatan dan ancaman dalam upaya pelestarian TNK. Hasil analisis SWOT disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis SWOT mengenai pengelolaan kolaboratif TNK
 Table 5. SWOT analysis on collaborative management of TNK

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Status legal sebagai TN Kutai 2. Eksistensi Kemenhut, Dirjen PHKA, serta BTN Kutai 3. Potensi biodiversitas dan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah 4. Potensi hidroorologis dan obyek wisata alam 5. Komitmen perusahaan anggota Mitra Kutai 6. Adanya dasar hukum untuk membentuk kolaborasi dalam pengelolaan kawasan TNK 7. Adanya dasar hukum penetapan zonasi pemanfaatan 8. Dukungan dari Karib Kutai 9. Dukungan dari Pemkab Kutai Kartanegara dan Kota Bontang 10. Dukungan dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi nasional maupun internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah pelepasan kawasan 2. Pengukuhan kawasan belum selesai 3. Belum ditetapkan zonasi kawasan 4. Lemahnya pengamanan kawasan dan penegakan hukum 5. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana Balai TNK 6. Kelembagaan dan kegiatan Mitra Kutai belum efektif 7. Balai TNK masih dominan dalam pengelolaan kawasan, kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah, masyarakat, pers dan lembaga penelitian dalam pengelolaan 8. Koordinasi dan komunikasi antar pihak yang lemah dalam pengelolaan TNK 9. Belum adanya kesepahaman atau penyamaan persepsi mengenai fungsi dan tata ruang TNK 10. Kurangnya informasi mengenai kondisi terkini TNK
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threatness</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama riset/inventarisasi kondisi potensi terkini dengan lembaga penelitian nasional/internasional 2. Kerja sama dengan pers/ media untuk mengangkat isu konflik kawasan serta potensi dan nilai penting TNK 3. Rekonfigurasi Mitra Kutai 4. Pengembangan program pendidikan dan kampanye dengan dana dari Mitra Kutai 5. Kolaborasi dengan Pemda setempat dan kepolisian dalam pengamanan dan penegakan hukum 6. Kolaborasi pengembangan ekowisata dalam kawasan, termasuk agrowisata 7. Kolaborasi pembangunan kawasan penelitian dengan lembaga penelitian nasional dan internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya legalitas desa dan masyarakat dalam kawasan oleh Pemkab Kutim 2. Ketidaksinkronan kebijakan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM 3. Adanya jalan arteri lintas kabupaten/kota di dalam dan sekitar kawasan 4. Eksploitasi potensi batubara dalam kawasan TNK 5. Diangkatnya isu <i>enclave</i> menjadi komoditi dalam kampanye pilkada 6. Kebutuhan lahan untuk pemekaran wilayah

Sumber : Kompilasi hasil analisis data primer dan sekunder serta Rencana Strategi Balai TN Kutai (2010)

Sources : *Compilation of the results of data analysis and the Strategic Planning of Kutai National Park Institute (2010)*

Dari hasil analisis SWOT tersebut terlihat bahwa penyamaan persepsi dan sinkronisasi perencanaan antar pemangku kepentingan terkait pengelolaan kawasan TNK merupakan modal dasar bagi kelestarian TNK. Untuk mencapai penyamaan persepsi dan sinkronisasi tersebut diperlukan tahapan panjang sebagai

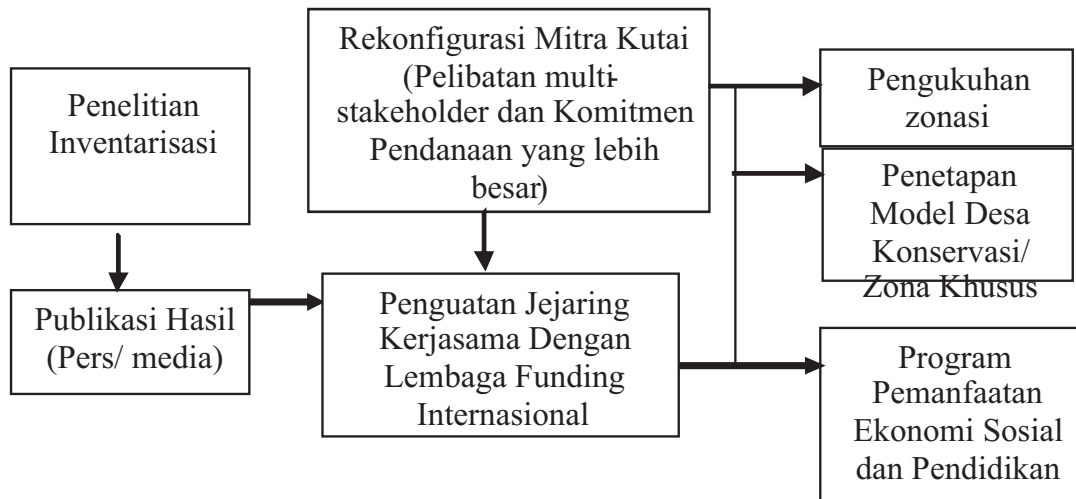
tindakan persuasif atau kampanye untuk berkolaborasi menyelamatkan TNK. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk penyempurnaan kelembagaan kolaboratif di kawasan TNK berdasarkan analisis SWOT tersebut disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Langkah-langkah penyempurnaan kelembagaan kolaboratif pengelolaan TNK
Table 6. Improvement steps on collaborative management of TNK

Langkah-langkah (<i>Steps</i>)	Prakondisi (<i>Precondition</i>)	Pemangku kepentingan terkait (<i>Related stakeholders</i>)
Penelitian inventarisasi potensi dan kondisi terkini TNK Kompilasi dan penyusunan status riset TNK Publikasi hasil riset	Koordinasi dengan lembaga penelitian nasional/internasional	Balai TNK, LSM (CIFOR, OCSP), Litbang Kemenhut, Unmul, LIPI
Kerja sama dengan media/pers nasional dan internasional	Kompilasi bahan publikasi/informasi terkini mengenai potensi dan masalah di TNK, serta nilai penting TNK	Pers/media cetak maupun elektronik
Penguatan jejaring kerja dan donor nasional dan internasional	Koordinasi dengan LSM internasional, Unmul, Kemenhut	Balai TNK, TNC, OCSP, CIFOR, Unmul, USAID, JICA, dan lembaga donor/riset internasional lainnya
Penetapan dan penguatan zonasi TNK	Pengangkatan isu oleh media/pers	Menteri Kehutanan
Rekonfigurasi Mitra Kutai	Membangun kesepahaman antar pihak, dengan bantuan pers/media Perlu fasilitator baru antara Kemenhut dengan Pemkab Kutim dan masyarakat (misal : perguruan tinggi lokal)	PHKA, Balai TNK, Karib Kutai, Mitra Kutai, Pemda, masyarakat, pers/media
Program pemanfaatan ekonomi, sosial, dan pendidikan di Desa Konservasi/ Model Desa Zona Khusus (misal : Agrowisata, Taman Safari, Pusat Pendidikan Lingkungan, dan <i>research area</i>)	Ada perencanaan dan skema pendanaan yang jelas dan legal dari Mitra Kutai/lembaga kolaborasi pengelolaan TNK Komitmen dari parapihak yang terkait, termasuk masyarakat	Lembaga Kolaborasi Pengelolaan TNK, masyarakat, lembaga penelitian, perguruan tinggi, Dinas Pendidikan,

Langkah-langkah/tahapan penyempurnaan kelembagaan kolaborasi pengelolaan TNK tersebut seyogyanya dilaksanakan secara

simultan dan saling terkait, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan kelembagaan kolaborasi pengelolaan TNK

Figure 4. Recommendation on improvement steps of collaborative management of TNK

Publikasi/ mengangkat isu nilai penting TNK serta program pemanfaatan ekonomi, sosial dan pendidikan di kawasan konflik, selain untuk menguatkan kolaborasi antar pihak, pembangunan sumber dana mandiri, dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat mengundang mitra / jejaring kerja internasional yang memiliki kekuatan untuk menghalangi ancaman investor pertambangan batubara dalam kawasan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kelembagaan pengelolaan berbasis ekosistem secara kolaboratif di kawasan TNK ternyata belum efektif bila dinilai berdasar prinsip-prinsip berikut :

1. Holistik, masih terfokus pada kegiatan inventarisasi dan pengamanan kawasan yang juga belum efektif, belum dilaksanakan pemanfaatan potensi ekonomi atau penanganan ancaman ekonomi, serta sosial.
2. Integratif, belum efektif karena pengelolaan masih didominasi Balai TNK, belum ada kesamaan persepsi karena informasi/ kampanye pelestarian dan nilai penting TN Kutai belum efektif, aspirasi parapihak belum terakomodir, fasilitator dan dewan penasehat yang tidak berfungsi, Mitra Kutai lebih banyak berfungsi sebagai penyandang dana, serta kurangnya partisipasi pihak lain seperti Pemerintah Daerah, masyarakat, pers dan lembaga penelitian nasional dan internasional.
3. Prinsip keberlanjutan, tidak tercapai karena prinsip holistik dan integratif belum terpenuhi, juga karena adanya

ancaman dari pihak swasta untuk mengeksplorasi potensi batubara yang besar di TNK.

B. Rekomendasi

1. Balai TNK bekerja sama dengan lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat internasional maupun nasional untuk melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Melakukan penelitian/inventarisasi potensi dan kondisi terkini TNK, penilaian manfaat ekonomi serta penyusunan status riset TNK.
 - b. Publikasi hasil penelitian terutama mengenai potensi dan kondisi terkini, serta mengangkat isu permasalahan dan nilai penting TNK melalui media/pers nasional dan internasional.
 - c. Penguatan jejaring kerja dengan lembaga donor internasional.
 - d. Inisiasi dan fasilitasi rekonfigurasi Mitra Kutai/lembaga pengelolaan kolaboratif TNK yang multipihak dengan aturan main yang jelas dan disepakati semua pihak.
2. Kementerian Kehutanan agar segera melakukan penetapan/pengukuhan zonasi kawasan sesuai yang direncanakan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 2010-2030 TNK.
3. Balai TNK, Forum Karib Kutai, Mitra Kutai, Pemerintah Kab. Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kutai Kartanegara, serta masyarakat (yang tergabung dalam lembaga kolaborasi pengelolaan TNK) agar bekerja sama melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Penyusunan program dan skema pendanaan lembaga kolaborasi yang disepakati semua pihak.
 - b. Kolaborasi pembangunan Model Desa Konservasi/ Model Desa Zona Khusus sebagai model penanganan perambahan dalam kawasan konservasi.

- c. Kolaborasi dalam program pemanfaatan ekonomi kawasan, seperti pembangunan kawasan agrowisata, Pusat Pendidikan Lingkungan, Taman Safari, kawasan ekowisata bahari, serta *research area*. Pembangunan terutama dilaksanakan di kawasan zona khusus dan zona pemanfaatan (untuk menangkal ancaman pembukaan pertambangan batubara dalam zona tersebut).

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, G.Z. 2006. Dapatkah pengelolaan kolaboratif menyelamatkan taman nasional Danau Sentarum?. *Forests and Governance Program No. 7/2006*. CIFOR. Bogor.
- Awang,S; A.Kasim;B.Tular dan Nur Salam. 2005. Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional : Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. CARE Internasional Indonesia, Kendari.
- Balai Taman Nasional Kutai. 2010. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kutai 2010-2029. Balai TN Kutai. Bontang, Kalimantan Timur.
- Balai Taman Nasional Kutai. 2010. Orangutan Kutai, beradaptasi dengan krisis. Buletin Pasak Bumi Edisi 03/III/2010. Balai Taman Nasional Kutai. Bontang, Kalimantan Timur.
- Borrini-Feyerabend, G. 2007. Collaborative management of Protected Areas: Tailoring the Approach to the Content. Social Policy group IUCN. Website : <http://iucn.org/themes/spg/Files/tailor.html>.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2010. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Website: <http://www.ditjenphka.go.id>.

- Erdman, MV., P.R Merrill, M. Mongdong, I. Arsyad, Z. Harahap, R. Pangalila, R. Elverawati, dan P. Baworo. 2004. Pengembangan sistem pengelolaan bersama yang efektif untuk desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia: Studi kasus taman nasional Bunaken.
- Kanji, N. and Greenwood L. 2001. Participatory approaches to research and development in IIED : Learning from experience. IIED. London. Website : <http://pubs.iied.org/pdfs/9095IIED.pdf>.
- Mahoney, J.T. 2002. The relevance of Chester Barnard's teaching to contemporary management education : communicating the aesthetic of management. *International Journal of Organizational Theory and Behavior*, 5 (1 & 2) 159-172 (2002). Website : <http://www.business.illinois.edu>.
- Mardle, S., Bennett, E., & Pascoe, S. (2003). Multiple Criteria Analysis of Stakeholder Opinion: A Fisheries Case Study. Centre for the Economics and Management of Aquatic Resources, University of Portsmouth. UK.
- Moeliono, M. and Purwanto, E. 2008. A Park in Crisis: Local Governance and National Policy. Paper presented at "Governing shared resources: connecting local experience to global challenges" 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of The Commons, Cheltenham, England, July 14-18 2008.
- Mulyana, A., M. Moeliono, P. Minnigh, Y. Indriatmoko, G. Limberg, N.U. Utomo, R. Iwan, Saparuddin, dan Hamzah. 2010. Kebijakan pengelolaan zona khusus : Dapatkah meretas kebuntuan dalam menata ruang taman nasional di Indonesia? Brief CIFOR No 01, April 2010. Center for International Forestry Research. Bogor.
- Peraturan Menteri Kehutanan No 19 Tahun 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Pomeroy, R.S. and Rivera-Guieb, R. 2006. Fishery Co-management: a practical handbook. International Development Research Centre, Ottawa, Canada.
- Pusat Informasi Pengelolaan Kolaboratif. 2006. Usaha pengembangan Taman Nasional Kutai melalui Pola Kemitraan. Website : <http://www.kolaboratif.org>.
- Ramírez, R. (1999) Stakeholder analysis and conflict management. In *Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*, pp. 101-26. Ottawa and Washington: IDRC and the World Bank. Website : <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022242.pdf>.
- Suaedi, 2011. Participatory Design of Policies for Sustainable Coastal Zone Development in Subang Regency. *Modern Applied Science* Vol. 5, No. 6; December 2011. Website : www.ccsenet.org/mas.
- Suhendang, E. 2004. Kemelut dalam Pengurusan Hutan; Sejarah Panjang Kesenjangan antara Konsepsi Pemikiran dan Kenyataan. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Utomo, N.A., G. Limberg, M. Moeliono, Y. Indriatmoko, A. Mulyana, R. Iwan, Saparudin, dan Hamzah. 2010. Peraturan saja tidak cukup : pelajaran dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di Taman Nasional Kutai dan

gagasan perbaikan ke depan. CIFOR Brief No 02, April 2010. Bogor.

Wiratno, D. Indriyo, A. Syarifuddin, dan A. Kartikasari. 2001. *Berkaca di Cermin*

Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional. The Gibbon Foundation Indonesia, PILI-NGO Movement, FOREst Press, dan Departemen Kehutanan. Jakarta.